



Uang Saku Kunker Dewan Rp1,5 Juta/Hari

Uang saku kunker di Kota Yogya merupakan yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten lain di DIY. Dan, perubahan ini hanya sebatas penyesuaian dan tidak merubah pagu anggaran

YOGYA, TRIBUN - Jatah uang saku untuk kunjungan kerja (kunker) atau perjalanan dinas dipastikan bertambah bagi kalangan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, meskipun biaya penginapan di hotel dipangkas. Anggaran tersebut mulai berlaku mulai bulan ini.

Dari data yang diperoleh, uang saku untuk kunker dewan mengalami kenaikan dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per hari. Sementara, biaya penginapan untuk anggota dewan atau pejabat tinggi pratama mengalami penurunan. Misalnya, untuk kunker di Bali biaya penginapan mencapai Rp3 juta turun menjadi Rp2,5 juta per hari.

"Perubahan standar tersebut seiring revisi peraturan wali kota (perwal)

terkait Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Yakni setelah terbitnya Perwal 21/2017 yang merevisi perwal 110/2016," jelas Kasubbag Perundangan Bagian Hukum Setda Kota Yogya, Syahrudin Alwi Efendi, Kamis (20/4).

Dia menjelaskan, komponen yang mengalami kenaikan adalah uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal. Meski ada penambahan biaya uang saku, namun tidak merubah pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam neraca APBD 2017.

"Hal ini karena terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam biaya penginapan hotel," jelasnya.

● ke halaman 14

Uang Saku Kunker Dewan

● Sambungan Hal 13

Dia juga menyebut, revisi Perwal ini mulai berlaku ketika sudah ditandatangani Penjabat Wali Kota. Dia menuturkan, usulan penambahan jatah uang saku kunker itu diajukan dalam rapat

terbatas antara Pimpinan DPRD Kota Yogya dengan Sekda serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya pada awal Maret lalu.

Paling rendah

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko menjelaskan, pagu anggaran untuk membiayai agenda kunker serta kegiatan kedewanan lainnya di tahun ini mencapai

Rp26,8 miliar. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membiayai beberapa hal perjalanan dinas.

Perjalanan dinas yang mendapat alokasi anggaran ini adalah reses, pertemuan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi), serta fungsi pendampingan pejabat eksekutif. Selain itu juga Badan Kehormatan, panitia khusus, bimbingan teknis.

Serta, perjalanan dinas tiap komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembuat Peraturan Daerah.

"Uang saku kunker di Kota Yogya merupakan yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten lain di DIY. Dan, perubahan ini hanya sebatas penyesuaian dan tidak merubah pagu anggaran," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005